

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV Mandar Maju, Bandung.

_____, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung.

_____, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Agustina, Prof. Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Asikin, H. Zainal dan Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Azizah, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang.

Budiarto, Agus, 2002, *Seri hukum Perusahaan (kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2019, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2018, *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris Di Dalam Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*,

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting, Jamin, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Perjanjian Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, M. Yahya, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hernako, Agus Yudha *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Ichsan, Achmad, 1987, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-Aturan Angkutan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indriyo, Stefanus Mahendra Soni, 2016, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Miru, Ahmadi, 2013, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nadapdap, Binoto, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas (berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Aksara, Jakarta.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Notodisuryo, Raden Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Peranginangin, Effendi, 1979, *Tehnik Pembuatan Akta I*, Jurusan Notariat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Pramono, Nindyo, 2012, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

_____, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta.

Rasaid, M. Nur, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Santoso, Djohari dan Achmad Ali., 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Soejono, dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanintijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudiyat, Imam, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Tim penyusun naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tjittrosudibio R. dan R. Subekti, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tobing, GHS Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Wicaksono, Frans Satrio, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Visimedia, Malang.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2007, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Widjaya, I.G. Rai, 1996, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Kesaint Blanc, Jakarta.

B. INTERNET

Adjie, Habib, “Wewenang, Substansi & Prosedur Putusan Mknw Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Yang Mengandung Cacat Yuridis”, dalam <https://drive.google.com/file/d/1t6tRpXxPb7yMWLH80eXw1gAGpXrJKU1H/view>, diakses tanggal 26 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

Edwin Elnizar, Norman, “9 Standar Etika Pelayanan Notaris yang Harus Tetap Dijaga” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59b61fe5d58d8/9-standar-etika-pelayanan-notaris-yang-harus-tetap-dijaga/>, diakses tanggal 26 Juli 2021, pukul 20.10 WIB.

NPP, “Catat! Notaris “Dikawal” Dua Lembaga Etik” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dikawal-dua-lembaga-etik/> diakses tanggal 18 Juli 2021 pukul 10.30 WIB.

Pieter Latumeten, “Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris” dalam <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diakses tanggal 12 Juni 2021 pukul 09.30 WIB.

Redaksi, “Komitmen Notaris Menjaga Jabatan Dengan Etika Moral Tinggi” dalam <https://notarymagazine.com/komitmen-notaris-menjaga-jabatan-dengan-etika-moral-tinggi/>, diakses tanggal 23 Juli 2021, pukul 22.35 WIB.

Triyansyah, Riki, “Sosialisasi Permenkumham 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Secara Virtual” dalam <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/sosialisasi-permenkumham-15-tahun-2020-tentang-tata-cara-pemeriksaan-majelis-pengawas-terhadap-notaris-secara-virtual>, diakses tanggal 20 Juli 2021, pukul 21.20 WIB.

T. Tunardy, Wibowo, “Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian” dalam <https://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/>, diakses tanggal 14 April 2021, pukul 14.00 WIB.

C. WEBINAR

Mandala, Subianta, “Implikasi Yuridis Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatan” dalam Zoom Meeting Program Studi Magister Kenotariatan dan Ikatan Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tanggal 02 Desember 2020, pukul 09.00-10.00 WIB.

D. TESIS

Cakra, Dimas Heru, “Jual Beli Saham Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Karena Cacat Hukum Dalam Pemindahan Hak Atas Saham (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya No.8/Pdt/2016/PT.PLK)”, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok, 2019.

Manalu, Serly Nova Analisa, “Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pemegang Saham Sekaligus Sebagai Ahli Waris Serta Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas Dalam Gugatan Perjanjian Jual Beli Saham Dan Aset Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 200/Pdt.Bth/2016/PN.MDN)”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Putra, Billy, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Jual Beli Saham Perusahaan (Studi Kasus PT Parco Air di Kota Balikpapan)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

E. JURNAL

Arlingga, Debby Dwi, “Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan”, *Lex Renaissance*, Nomor 2, Volume 2, Bulan Juli, Tahun 2017.

Halim, Yoefanca, Fricky Sudewo & Tyas Fidelia, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Ketidaksesuaian Akta Salinan dengan Minuta Akta”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Bulan Desember, Tahun 2019.

Mardiyah, *et. al.*, “Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Tahun 2016-2017.

Saputra, Denny, “Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”, *Jurnal Akta*, 2017.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P). Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal

Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran

Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18 dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan

Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaiaan

Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap
Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 489.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap

Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545.

G. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/Pdt/2016/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1681 K/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/Pdt/2020.

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/Pdt/2016/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1681 K/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188 PK/Pdt/2020.